

PEMERATAAN PENDIDIKAN MENUJU REALISASI ASAS KEADILAN SOSIAL

A. Sudiharto DJIWANDONO

Repelita III yang sekarang tengah dilaksanakan menitikberatkan usaha pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya melalui serangkaian usaha dan kegiatan yang kita kenal sebagai delapan jalur pemerataan. Kedelapan jalur pemerataan tersebut adalah:

- (1) pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat
- (2) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
- (3) pemerataan pembagian pendapatan
- (4) pemerataan kesempatan kerja
- (5) pemerataan kesempatan berusaha
- (6) pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan
- (7) pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air
- (8) pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Ini berarti bahwa mulai dengan Repelita III usaha untuk mewujudkan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lebih diperjelas dan diharapkan akan lebih ditingkatkan dalam Repelita-repelita yang akan datang, sehingga pada akhirnya cita-cita keadilan sosial itu benar-benar terwujud dalam masyarakat Bangsa Indonesia.

Asas keadilan sosial menghendaki terdapatnya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk menikmati hasil-hasil pembangunan nasional, tanpa diskriminasi karena alasan apapun. Konsekuensi dari prinsip ini antara lain perlunya lebih tersebarunya kegiatan pembangunan sampai di seluruh pelosok Tanah Air, dan perlunya diciptakannya iklim dan kondisi sedemikian yang memungkinkan setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama menikmati hasil-hasil pembangunan. Sebagaimana kita mengetahui, baik di dalam GBHN maupun di dalam Repelita jelas ditegaskan bahwa pembangunan nasional yang kita laksanakan itu ditujukan ke arah membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya.

Dalam hubungan ini tampak bahwa kedelapan jalur pemerataan yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam program-program pembangunan dalam Repelita III tersebut berkenaan dengan hal-hal yang esensial bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional yang kita laksanakan.

Kiranya tidak mudah untuk menentukan jalur mana yang dapat dipandang sebagai jalur yang paling penting dari kedelapan jalur pemerataan tersebut, tetapi kiranya jelas bahwa antara jalur yang satu dengan jalur lainnya sangat erat hubungannya satu sama lain dan saling melengkapi.

Pada umumnya ukuran yang lazim dipergunakan untuk meninjau keberhasilan usaha pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya adalah pemerataan dalam pembagian pendapatan dalam masyarakat. Pemerataan pembagian pendapatan dalam masyarakat erat hubungannya dengan pemerataan kesempatan kerja yang juga berarti makin meratanya kesempatan untuk menikmati hasil-hasil pembangunan.

Tetapi di lain pihak, khususnya untuk negara sedang berkembang seperti Indonesia, jalur pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan (dan pelayanan kesehatan) tampak mempunyai arti yang sangat penting dan dalam batas-batas tertentu bersifat menentukan. Melalui pemerataan kesempatan

memperoleh pendidikan berarti lebih banyak anggota masyarakat mendapatkan kesempatan untuk mempertinggi mutu pribadinya, meningkatkan ilmu dan pengetahuannya, ketrampilan serta kesadarannya, yang kesemuanya itu akan berarti memberikan kesempatan dan kemungkinan yang lebih besar bagi peningkatan kehidupan dan penghidupannya, ke arah pengembangan dirinya menjadi manusia yang utuh lahiriah dan batiniah.

Dalam hubungannya dengan jalur-jalur pemerataan lainnya tampak fungsi yang begitu menonjol dan menentukan dari jalur pemerataan pendidikan terhadap usaha-usaha pemerataan yang lain, baik jalur yang secara langsung berkenaan dengan bidang sosial ekonomi maupun dengan jalur pemerataan yang tidak secara langsung berkenaan dengan bidang tersebut, seperti jalur kedelapan, yaitu pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Dalam usaha pemerataan pendapatan misalnya, pemerintah perlu menetapkan berbagai langkah dan kebijaksanaan dengan mempergunakan berbagai instrumen yang diperlukan. Namun di segi lain masalah pemerataan pendapatan juga tergantung dari produktivitas tenaga kerja, yang pada dasarnya banyak ditentukan oleh mutu tenaga kerja itu sendiri. Kemampuan mengerjakan pekerjaan secara efisien, kecakapan dan ketrampilan serta kualifikasi-kualifikasi lainnya merupakan persyaratan yang harus dibina dan dikembangkan guna mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Dalam hal ini jelas bahwa bidang pendidikan dalam arti luas memegang peranan yang sangat penting.

Hal yang sama kiranya juga berlaku dalam usaha pemerataan melalui jalur-jalur yang lain, seperti pemenuhan kebutuhan pokok, kesempatan kerja maupun partisipasi dalam pembangunan.

Demikian juga dalam hal pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, khususnya keadilan di bidang hukum. Betapapun langkah-langkah penyempurnaan di bidang hukum dan perundangan dilakukan termasuk peningkatan aparat-aparat

penegak hukumnya, usaha itu masih belum sepenuhnya menjamin terlaksananya tujuan yang hendak dicapai. Berbarengan dengan itu harus diusahakan peningkatan kesadaran hukum warga negara sehingga setiap warga negara sadar akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara dari suatu negara hukum yang demokratis. Betapa masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat yang mencerminkan adanya kepincangan-kepincangan di bidang hukum ini, yang sebagian korbannya umumnya terdiri dari lapisan masyarakat yang belum mencapai taraf pendidikan yang cukup, antara lain karena tiadanya kesempatan untuk itu.

Kiranya jelas bahwa jalur pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menduduki tempat yang sangat penting dan strategis dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dalam kerangka tinjauan jangka panjang kiranya tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada dasarnya merupakan kunci keberhasilan usaha pemerataan hasil-hasil pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang berkeadilan sosial yang kita cita-citakan.

USAHA PEMERATAAN PENDIDIKAN DALAM REPELITA III

Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, sebagaimana dikemukakan oleh Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR-RI pada tanggal 16 Agustus 1978, dan yang kemudian dituangkan dalam Repelita III sekarang, dilakukan melalui berbagai usaha dan kegiatan secara bertahap. Dalam tahap sekarang usaha akan dititikberatkan pada pendidikan tingkat dasar, yaitu dengan mulai merealisasikan kewajiban belajar. Sementara itu pendidikan pada tingkat menengah dan tinggi ditangani secara lebih terbatas dengan memperluas daya tampung sehingga lebih banyak para lulusan dari tingkat di bawahnya akan mendapatkan tempat.

Hal ini dapat kita lihat dari pokok-pokok kebijaksanaan yang ditempuh sebagai berikut:

- a. Bahwa sasaran usaha pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan adalah dilaksanakannya kewajiban belajar, yang merupakan cita-cita nasional yang sejak lama diidam-idamkan.
- b. Usaha yang dilakukan guna mencapai sasaran tersebut ialah dengan lebih meningkatkan lagi sarana dan sistem pendidikan.
- c. Titik berat perhatian dicurahkan pada anak-anak usia Sekolah Dasar, khususnya di pedesaan dan di kota-kota dengan penduduk berpenghasilan rendah, sehingga pada akhir Repelita III diharapkan semua anak kelompok usia Sekolah Dasar (7-12 tahun) dapat tertampung di Sekolah-sekolah Dasar.
- d. Di samping itu maka usaha-usaha lain yang dilakukan dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan (tingkat dasar) berupa program-program khusus yang disebut "Sekolah Kecil" dan "Program Kejar". Program Sekolah Kecil dimaksudkan sebagai usaha untuk mengatasi kesulitan di tempat-tempat tertentu yang tidak memungkinkan dibangunnya Sekolah Dasar menurut persyaratan yang ada. Pada Sekolah Kecil seorang guru memberikan pelajaran kepada kelompok-kelompok kecil murid yang tingkat pendidikannya berbeda-beda. Sedangkan Program Kejar (bekerja sambil belajar) khusus ditujukan bagi mereka yang di luar sekolah, dengan memberikan pengetahuan dasar, cara berfikir dan ketrampilan, tanpa harus meninggalkan pekerjaannya sehari-hari.
- e. Di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, (SLP, SLA, Pendidikan Tinggi) usaha perluasan kesempatan belajar dilakukan dengan memperbesar daya tampung, dengan terus memperbanyak gedung-gedung sekolah dan ruang-ruang belajar. Khusus di tingkat lanjutan pertama akan dikembangkan program "SMP Terbuka", yang ditujukan guna menampung anak-anak yang telah lulus Sekolah Dasar tetapi karena hal-hal tertentu tidak dapat melanjutkan pendidikan di SMP di sekitarnya.

Dalam situasi sekarang mengingat struktur masyarakat dan kenyataan-kenyataan yang ada dan dihadapi di bidang pen-

didikan, kebijaksanaan tersebut kiranya cukup memadai sebagai langkah permulaan yang lebih terencana ke arah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dalam arti yang sebenarnya. Tentu langkah ini masih memerlukan langkah-langkah selanjutnya yang lebih bersifat fundamental dan konsepsional yang akan lebih memberikan isi dan arah yang tepat dari sistem pendidikan nasional kita. Pemerataan pendidikan memang merupakan suatu masalah yang mendesak pada dewasa ini, namun itu bukan satu-satunya masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan kita secara keseluruhan. Masalah mutu pendidikan dan masalah relevansi pendidikan dengan usaha pembangunan bangsa yang selama bertahun-tahun sudah sering kali disinyalir dan dikemukakan dalam berbagai forum dan kesempatan masih memerlukan penanganan secara mendasar dan konsepsional. Dengan perkataan lain usaha pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu ditangani dalam rangka usaha pembaharuan sistem pendidikan nasional kita di masa mendatang. Sistem pendidikan nasional secara struktural seyogyanya memiliki mekanisme sedemikian rupa yang lebih menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi sebagian besar anggota masyarakat.

Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada umumnya memang harus dilihat dan dimulai dari bawah, berdasarkan pemikiran bahwa setiap orang sekurang-kurangnya sudah mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan tingkat dasar yang memungkinkan ia memiliki pengetahuan dasar. Makin ke atas pendidikan menjadi semakin selektif sehingga akan merupakan bentuk piramida yang seimbang. Dari segi ini kita memang masih menghadapi kenyataan bahwa belum semua anak kelompok umur Sekolah Dasar (7-12 tahun) mendapatkan kesempatan belajar di Sekolah Dasar, di samping adanya kenyataan masih banyaknya orang-orang dewasa yang buta huruf dan yang tidak pernah sama sekali mengenyam pendidikan formal karena tiadanya kesempatan untuk itu.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen P dan K memperkirakan bahwa pada akhir Repelita

II (1978/1979) akan dapat ditampung sejumlah 20.9 juta anak dari 23 juta anak-anak kelompok usia Sekolah Dasar atau sebesar 85.2% sedangkan pada akhir Repelita III (1983/1984) akan terdapat 24.5 juta anak kelompok usia tersebut yang seluruhnya diharapkan sudah tertampung di Sekolah-sekolah Dasar.¹

Sementara itu dalam Repelita III dicantumkan angka-angka sebagaimana ternyata dalam Tabel 17-3 tentang Proyeksi Perkembangan Murid Pendidikan Dasar. Data-data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 1979 terdapat jumlah murid Sekolah Dasar sebesar 23.9 juta terdiri dari 20.9 murid Sekolah Dasar dan 3 juta murid Madrasah Ibtidaiyah, dengan jumlah anak dari kelompok umur 7-12 tahun sebesar 21.839.000. Pada akhir Repelita III (1984) proyeksinya adalah 26.137.000 murid-pendidikan dasar yang terdiri dari 22.887.000 murid Sekolah Dasar dan 3.250.000 murid Madrasah Ibtidaiyah, di antaranya anak-anak dari kelompok umur 7-12 tahun.²

Mengenai jumlah orang-orang yang buta huruf berdasarkan keterangan pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga, sejak sensus tahun 1971 tidak banyak mengalami perubahan. Berdasarkan keterangan ini penduduk berusia 10 tahun ke atas yang buta huruf berjumlah 32.498.850 orang.³

Dari hasil Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) 1976 tercatat antara lain bahwa 81.36 persen dari penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, selebihnya tinggal di daerah perkotaan (18.36 persen). Bukankah ini berarti bahwa masalah pemerataan pada umumnya, pemerataan pendidikan pada khususnya pada hakekatnya bersangkutan dengan, terutama rakyat di daerah-daerah pedesaan yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia.

1 Ditjen PDM, Dep. P dan K. *Rancangan Pengembangan Pendidikan Dasar dan Pmbiyaannya Dalam Masa Pelita II dan III*, April 1975

2 *Repelita III*, Tabel 17-3

3 *Antara*, 21 Maret 1978

Tabel 1

PERKIRAAN PERKEMBANGAN PENDUDUK UMUR 7-12 TAHUN DAN BANYAKNYA MURID, KELAS DAN SEKOLAH DASAR TAHUN 1974/1975 SAMPAI DENGAN 1983/1984

TAHAP	TAHUN	Penduduk Umur 7-12 tahun (ribuan)			Murid Sekolah Dasar (ribuan)			Kelas			Sekolah		
		Lama	Tambahan	Jumlah	Lama	Tambahan	Jumlah	Lama	Tambahan	Jumlah	Lama	Tambahan	Jumlah
Pelita II	1974/1975	20.500,0	700,0	21.200,0	13.600,0	1.100,0	14.700,0	425.000	20.000	445.000	70.833	3.334	74.167
	1975/1976	21.200,0	600,0	21.800,0	14.700,0	1.200,0	15.900,0	445.000	10.000	455.000	74.167	1.666	75.833
	1976/1977	21.800,0	500,0	22.300,0	15.900,0	1.400,0	17.300,0	455.000	20.000	475.000	75.833	3.334	79.167
	1977/1978	22.300,0	400,0	22.700,0	17.300,0	1.700,0	19.000,0	475.000	20.000	495.000	79.167	3.333	82.500
	1978/1979	22.700,0	300,0	23.000,0	19.000,0	1.900,0	20.900,0	495.000	30.000	525.000	82.500	5.000	87.500
Pelita III	1979/1980	23.000,0	299,0	23.299,0	20.900,0	768,0	21.668,0	525.000	16.700	541.700	87.500	2.784	90.284
	1980/1981	23.299,0	302,9	23.601,9	21.668,0	751,9	22.421,9	541.700	18.847	560.547	90.284	3.141	93.425
	1981/1982	23.601,9	306,8	23.908,7	22.421,9	771,4	23.191,5	560.547	19.240	579.787	93.425	3.206	96.631
	1982/1983	23.908,7	310,8	24.219,5	23.191,5	785,8	23.977,3	579.787	19.646	599.433	96.631	3.274	99.905
	1983/1984	24.219,5	314,9	24.534,4	23.977,3	557,1	24.534,4	599.433	13.927	613.360	99.905	2.322	102.227

Sumber: Rancangan Pengembangan Pendidikan Dasar dan Pembiayaannya Dalam Masa Pelita II dan III, (Buku I), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (April 1975)

Tabel 2

PROYEKSI PERKEMBANGAN MURID PENDIDIKAN DASAR

	1979	1980	1981	1982	1983	1984
(1) Jumlah murid \times 1.000 (SD + Madrasah Ibtidaiyah)	23.900	24.342	24.596	25.120	25.559	26.137
1.1. SD	20.900	21.292	21.498	21.970	22.359	22.887
1.2. Madrasah Ibtidaiyah	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250
(2) Jumlah anak umur 7-12 tahun	21.839	21.895	21.802	21.945	22.011	22.216
(3) Persentase murid yang berumur kurang dari 7 dan lebih dari 12 tahun (%)*	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
(4) Persentase jumlah murid dari anak usia sekolah (SD + Madrasah Ibtidaiyah)**	93,1	94,5	95,9	97,3	98,7	100,0
4.1. SD	81,4	82,7	83,8	85,1	86,3	87,6
4.2. Madrasah Ibtidaiyah	11,7	11,8	12,1	12,2	12,4	12,4
(5) Lulusan SD (\times 1.000)	1.818	1.852	1.870	1.911	1.945	1.991
(6) Kebutuhan Guru (\times 1.000)	29.1	24.1	31.8	29.9	34.2	(149.1)***

* Dari seluruh jumlah murid pada tahun yang bersangkutan

** Dari anak usia 7-12 tahun pada tahun yang bersangkutan

*** Jumlah 1979 — 1983

Sumber: *Repelita III*

Dalam bagian pendahuluan sudah dikemukakan bahwa pemerataan pendapatan juga tergantung dari tingkat produktivitas tenaga kerja yang erat hubungannya dengan pendidikan yang diperolehnya. Dalam hubungan ini kita mengetahui dari hasil Sakernas 1976 bahwa penduduk di daerah pedesaan yang bekerja di berbagai lapangan pekerjaan pada tahun 1976 berjumlah 40.408.678 orang.

Dari jumlah tersebut terdapat 10.441 orang tamatan Perguruan Tinggi, 35.029 orang tamatan Akademi, 738.086 orang tamatan SLA (Umum dan Kejuruan), 1.250.802 orang tamatan SLP (Umum dan Kejuruan), dan tamatan Sekolah Dasar sejumlah 9.485.950 orang. Sebagian besar lainnya pernah mengenyam pendidikan dasar tetapi tidak sampai tamat (15.041.820 orang), dan sejumlah 13.846.550 orang yang sama sekali belum pernah mengikuti pendidikan sekolah.¹

Dalam persentase angka-angka tersebut memberikan gambaran sebagai berikut:

Tamat Perguruan Tinggi	: 0.03
Tamat Akademi	: 0.09
Tamat Sekolah Lanjutan Atas	: 1.80
Tamat Sekolah Lanjutan Pertama	: 3.10
Tamat Sekolah Dasar	: 23.50
Tidak/belum tamat Sekolah Dasar	: 37.20
Tidak pernah bersekolah	: 34.30

Keadaan tersebut jelas masih jauh dari yang kita inginkan sebagai bangsa yang merdeka, yang mencita-citakan kemajuan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Banyaknya angkatan kerja yang tidak terdidik atau yang tidak memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi mempunyai pengaruh terhadap rendahnya pendapatan rata-rata. Tabel 4 menunjukkan hasil Susenas IV 1969/1970 dan hasil Susenas V/Sakernas 1976 tentang Rata-rata Pendapatan Per Kapita Menurut Usaha Rumah Tangga, Dalam Rupiah Pada Harga Tahun 1976.

¹ Lihat Tabel 3

Tabel 3

PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA DAN PENDIDIKAN YANG
DITAMATKAN DI PEDESAAN

Lapangan Pekerjaan	Tidak Sekolah	Belum Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLP		Tamat SLA		Tamat Akademi	Tamat Universitas	Jumlah
				Umum	Kejuruan	Umum	Kejuruan			
Pertanian	10.392.874	10.922.668	6.443.320	419.224	88.762	45.441	62.219	5.798	725	28.381.031
Perdagangan	1.619.087	1.705.495	1.229.395	153.725	30.556	33.524	27.114	718	474	4.800.088
Industri	1.111.431	1.224.475	639.589	70.564	20.671	12.835	14.024	895	—	3.094.484
Jasa	483.341	681.041	710.546	231.766	156.494	109.576	401.535	26.186	8.768	2.809.253
Angkutan, Komunikasi	99.399	252.030	273.196	43.533	5.144	9.541	6.753	192	—	689.788
Bangunan	104.336	202.936	151.588	16.876	5.164	3.471	4.632	1.110	474	490.637
Pertambangan	27.692	39.737	20.361	1.928	474	669	130	—	—	90.991
Kuangan, Persewaan	1.755	7.671	11.110	2.957	526	4.056	2.280	130	—	30.485
Listrik, Gas, Air	—	1.224	3.204	2.000	246	—	286	—	—	6.960
Lain-lain	6.635	4.493	3.641	192	—	—	—	—	—	14.961
Jumlah	13.846.550	15.041.820	9.485.950	942.765	308.037	219.113	518.973	35.029	10.441	40.408.678

Sumber: Biro Pusat Statistik, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia September-Desember 1976*, Mei 1978, Jakarta, halaman 24

Tabel 4

RATA-RATA PENDAPATAN PER KAPITA MENURUT USAHA RUMAH TANGGA DALAM RUPIAH PADA HARGA TAHUN 1976

Kelompok Usaha Rumah Tangga	Hasil Susenas IV 1969/1970						Hasil Susenas V/Sakernas 1976					
	Jawa-Madura		Luar Jawa		Indonesia		Jawa-Madura		Luar Jawa		Indonesia	
	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota
Pertanian	3.398	5.207	3.335	4.972	3.364	5.006	3.196	3.965	4.275	4.514	3.831	4.415
Buruh	2.744	4.304	4.596	4.528	3.131	4.403	3.749	9.273	5.224	7.009	4.354	8.448
Perdagangan	3.879	6.375	7.607	6.610	5.195	6.492	3.644	7.180	6.118	7.866	4.698	7.466
Industri	2.922	7.206	3.476	9.348	3.087	8.536	2.680	10.358	4.960	6.144	3.509	7.852
Jasa-jasa	4.737	6.266	5.087	6.359	4.831	6.304	3.278	6.685	4.384	5.687	3.940	6.276
Pengangkutan	3.790	3.498	3.932	6.621	3.837	4.615	4.115	5.929	3.664	5.893	3.908	5.918
Bangunan	5.308	15.510	4.562	22.331	5.010	20.325	3.670	8.504	7.511	8.688	4.692	8.596
Lain-lain	3.462	5.352	4.047	2.917	3.717	3.791	4.074	—	—	—	4.074	—
Total	3.241	4.866	3.682	5.451	3.440	5.127	3.398	8.265	4.598	6.701	4.024	7.607

Sumber: Biro Pusat Statistik, *Masalah Pembagian Pendapatan Penduduk Menurut Sosio Profesional di Indonesia 1969/1970-1976*, Lampiran 7 dan 8

Mengingat hal-hal tersebut di atas, sasaran usaha pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yaitu pelaksanaan kewajiban belajar, maupun titik berat perhatian yang dicurahkan pada anak-anak usia Sekolah Dasar, khususnya di pedesaan dan di kota-kota dengan penduduk berpenghasilan rendah, kiranya memang merupakan suatu keharusan.

Guna mencapai sasaran tersebut pertama-tama tentu diperlukan lebih banyak dan luasnya sarana-sarana pendidikan, khususnya gedung-gedung sekolah/ruang-ruang belajar serta tenaga guru. Dalam hal peningkatan sarana ini saja sudah dapat dibayangkan timbulnya berbagai masalah yang harus dihadapi dan harus ditangani secara cermat, khususnya oleh aparat-aparat yang bersangkutan, baik di pusat maupun di daerah. Masalahnya tidak hanya diperlukannya dana/anggaran yang sangat besar, tetapi juga menyangkut segi-segi ketepatan lokasi dan penyebarannya, mengingat wilayah tanah air kita yang begitu luas. Karena titik berat usaha di daerah pedesaan, faktor geografis tentulah merupakan salah satu faktor yang penting untuk diperhitungkan. Berdasarkan sumber Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri, di seluruh Indonesia terdapat 60.415 buah desa, 21 persen merupakan daerah pedesaan yang berada dalam lingkungan orbitasi kota, sedangkan yang selebihnya yang merupakan bagian yang terbesar (79 persen) tergolong pedesaan yang jauh dari pusat fasilitas, sebagian (14 persen) bahkan tergolong desa-desa yang terisolasi. Dalam hubungan ini mungkin program "Sekolah Kecil" untuk sementara merupakan salah satu jalan pemecahan, terutama untuk daerah-daerah yang terpencil letaknya.

Kecuali sarana gedung sekolah/ruang belajar, masalah tenaga guru jelas memerlukan penanganan yang serius, bukan saja karena pentingnya fungsi guru dalam proses pendidikan tetapi juga karena "pengadaannya" selalu merupakan masalah

tersendiri yang bagi negara-negara sedang berkembang sering kali merupakan suatu dilema yang sulit diatasi.

Untuk mencapai tujuan pemerataan di bidang pendidikan jelas diperlukan tambahan tenaga guru dalam jumlah yang besar dan dengan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan, pada tahap sekarang khususnya untuk tingkat Sekolah Dasar tetapi pada gilirannya juga untuk tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Ini hanya dapat dilakukan melalui program pendidikan guru yang terencana baik, berdasarkan suatu konsep yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten. Di samping itu masih terdapat masalah lain yang secara langsung terkait dengan usaha pengadaan tenaga guru, ialah status sosial guru serta peningkatan keadaan sosio-ekonomi dari para guru.

Tetapi justru di situlah letaknya pokok masalah dan kesulitan kita di bidang pendidikan guru selama ini. Salah satu lembaga pendidikan guru yang setaraf dengan pendidikan tinggi yaitu Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (IKIP) yang sebelumnya merupakan bagian dari suatu Universitas (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan/FKIP), dalam perkembangannya telah menjadi kabur sebagaimana disinyalir antara lain oleh Prof. Sumitro Djojohadikusumo, bekas Menteri Negara Riset dan sekarang duduk sebagai Ketua II KPPN, yang dalam ceramahnya di depan Civitas Academica IKIP Negeri Jakarta bulan Mei 1979 antara lain mengemukakan: "IKIP yang tadinya dimaksudkan sebagai wahana pengadaan guru, kini dalam kenyataannya berkembang secara mendua (ambivalensi) antara lembaga pengadaan guru dan lembaga bergaya universitas. Sikap berkembang secara mendua itu tidak menguntungkan, terutama kalau ditinjau dari sudut pengadaan dan pembinaan guru. Di pihak lain banyak lulusan IKIP sendiri yang bekerja pada bidang yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan."¹

Sinyalemen tersebut kiranya mengungkapkan salah satu masalah di sektor pendidikan guru selama ini, yaitu adanya ketidakjelasan dan ketimpangan pola dalam pendidikan guru

1 *Sinar Harapan*, 30 Mei 1979

yang tentu membawa akibat yang luas dalam dunia pendidikan kita. Meskipun pada kesempatan lain kita mendengar bahwa sejak tahun 1976 telah diprogramkan pembaharuan IKIP sebagai lembaga pendidikan guru, program mana akan benar-benar terwujud mulai tahun kuliah 1979/1980 ini, sebagaimana dijelaskan oleh Drs. Hamdan Mansoer, Sekretaris Eksekutif Konsorsium Ilmu Pendidikan.¹

Mengenai sinyalemen banyaknya lulusan IKIP yang bekerja di luar bidang pendidikan, bahkan juga adanya guru-guru yang meninggalkan profesinya dan pindah ke bidang lain, kiranya erat hubungannya juga dengan persoalan status sosial guru yang dari tahun ke tahun cenderung makin merosot, di samping keadaan sosio ekonomi yang relatif parah dibandingkan dengan bidang profesi-profesi yang lain.

Bagaimanapun kiranya jelas, bahwa usaha pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan (dan pembaharuan pendidikan pada umumnya) tidak bisa dilepaskan dari masalah pengadaan tenaga pendidik/tenaga guru. Hal ini berarti perlunya perhatian yang serius terhadap masalah pendidikan guru, status sosial dan peningkatan taraf sosio ekonomi dari para guru.

Sebagaimana dikemukakan oleh Adam Curle dalam *Educational Strategy for Developing Societies*, London, 1963, yang dikutip oleh John Vaizey: "Pendidikan guru adalah salah satu pusat syaraf dari sistem pendidikan. Banyak yang dapat dilakukan untuk menaikkan standar pendidikan dan dengan biaya yang lebih sedikit, yaitu dengan melalui pendidikan guru-guru lebih daripada aktivitas lainnya. Tetapi di negara-negara yang belum berkembang secara relatif sedikit sekali perhatian ditujukan terhadap tugas yang penting ini."

Selanjutnya dikatakan:

1 *Kompas*, 1 Juni 1979

Ini berarti bahwa perlu dibangun konsep profesi mengajar secara keseluruhan — suatu kader terdiri dari guru-guru yang terlatih. Di banyak negara guru-guru adalah yang terendah di antara yang rendah: tempat mereka di masyarakat tidak aman. Di Uni Soviet hasil terbesar yang mungkin dicapai oleh Revolusi adalah memberi guru-guru itu suatu status, sedangkan di Amerika Serikat tempat dari seorang guru di masa-masa perkembangan bangsa itu adalah relatif tinggi. Lalu apa yang dapat dilakukan oleh negara-negara yang malang ini? Mereka harus menaikkan gaji guru, namun mereka terlalu miskin untuk melakukan hal itu. Tanpa adanya suatu perubahan sosial, sulitlah untuk mengetahui bagaimana status guru itu bisa diubah.

”Guru-guru yang memperoleh latihan yang baik, terutama bila untuk mereka ada kesempatan meningkatkan mutu mereka dan memperoleh promosi melalui berbagai bentuk latihan kerja, merupakan unsur yang penting dalam masyarakat. Bukan saja peranan edukatif mereka yang maha penting tetapi juga dampak mereka terhadap seluruh masyarakat. Barang kali dari semua golongan lainnya, guru-guru adalah contoh dari kebajikan golongan menengah. Mereka muncul berkat bakat-bakat mereka dan mereka menyerahkan hidup mereka untuk menolong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Karena sifat pekerjaan itu, mereka cenderung menjadi wanita dan pria yang berintegritas dan memiliki kesadaran sosial. Mereka cukup baik keadaannya jika diukur dengan standar masyarakat yang terbelakang, tetapi tidaklah secara berlebihan karena mereka mempunyai kesempatan yang kecil untuk mengeksploitasi jabatan mereka. Di atas semua itu mereka merupakan kekuatan dari kemajuan yang dimanifestasikan secara pantas dan teratur.”¹

Konsep tentang guru tersebut, khususnya mengenai fungsi dan peranan guru dalam proses pendidikan mungkin telah mengalami perubahan terutama di negara-negara maju, di mana kemajuan teknologi telah mencapai taraf begitu tinggi sehingga di bidang pendidikan fungsi guru sedikit banyak digantikan oleh

1 John Vaizey, *Pendidikan di Dunia Modern* (terjemahan oleh L.P. Murtini), P.T. Gunung Agung, Jakarta 1974, hal. 65-66

instrumen-instrumen instruksional hasil teknologi modern. Ini membawa perkembangan dalam teknik ataupun cara-cara pelaksanaan dalam proses belajar mengajar di mana kehadiran fisik seorang guru mungkin tidak lagi diperlukan secara terus-menerus. Namun bagaimanapun juga, semuanya itu tidak menghilangkan peranan guru, lebih-lebih di dalam suatu negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Bahwa diperlukan konsep-konsep baru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar kiranya merupakan tuntutan yang harus dijawab oleh dunia pendidikan dalam rangka meningkatkan efektivitas dari proses pendidikan di sekolah-sekolah pada setiap jenjang.

Namun betapapun sarana-sarana fisik maupun instruksional tersedia dalam jumlah dan mutu yang memadai, situasi dan lingkungan pendidikan pada umumnya merupakan prasarana yang sangat menentukan. Ini menyangkut masalah organisasi dan pengelolaannya, yang tidak saja ditentukan oleh struktur yang baik, tepat dan efisien, tetapi lebih-lebih oleh faktor manusianya, oleh orang-orang atau pejabat-pejabat yang memegang kunci (key persons) dalam setiap tingkat mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah.

Hal-hal yang diuraikan di atas hanya mengungkapkan beberapa aspek dari kompleksitas permasalahan yang ada di dunia pendidikan kita dewasa ini, serta kesulitan-kesulitan yang ada dan yang mungkin akan timbul dalam usaha pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Bukan hanya masalah dana/anggaran yang berperan, meskipun hal itu sangat menentukan, tetapi usaha untuk mengatasi masalah-masalah pokok dunia pendidikan kita di mana masalah pemerataan termasuk di dalamnya, memang merupakan usaha yang membutuhkan waktu dan banyak pengorbanan.

Sepintas lalu nampaknya memang terdapat cukup kemajuan yang menggembirakan di bidang pendidikan sejak Bangsa Indonesia menikmati kemerdekaannya kembali pada tahun 1945 yang lalu. Bahkan beberapa tokoh pendidikan melihat sektor pendidikan ini sebagai sektor yang paling berhasil, ditinjau dari

melonjaknya angka-angka kenaikan jumlah murid/mahasiswa serta kenaikan jumlah sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Pemerataan di sektor pendidikan dipandang sebagai yang paling berhasil meskipun diakui bahwa selama ini pelaksanaan pendidikan kita berjalan tanpa konsep dasar.¹

Di samping lebih meningkatkan lagi sarana pendidikan dalam Repelita III sebagai usaha guna mencapai sasaran pemerataan di bidang pendidikan, usaha lain yang dilakukan adalah peningkatan sistem pendidikan. Dalam hubungan ini peningkatan sistem pendidikan sebagai usaha guna mencapai sasaran pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka Repelita III memang belum mencakup sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Hal ini kiranya cukup bisa dimengerti. Pada hakekatnya masalah ini berkenaan langsung dengan permasalahan pokok dunia pendidikan kita sampai saat ini yang selama ini dipandang sebagai sumber dari kepincangan-kepincangan yang terjadi di sektor pendidikan. Namun sementara itu Presiden R.I. telah menugaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membentuk suatu Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional (KPPN) dengan tugas menyusun suatu konsep mengenai sistem pendidikan nasional yang bersifat semesta, menyeluruh dan terpadu. KPPN dimaksud telah dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0283/P/1978 tertanggal 25 Agustus 1978.

PEMBAHARUAN PENDIDIKAN NASIONAL, PEMERATAAN DAN MUTU PENDIDIKAN

Pembentukan Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional (KPPN) sebagaimana disinggung di muka dapat dipandang sebagai langkah yang sangat penting dalam sejarah pendidikan nasional kita sejak masa kemerdekaan. Hal ini tidak berarti bahwa sebelumnya kita tidak menyadari perlunya pembaharuan sistem pendidikan yang berlaku selama ini, yang pada dasarnya

1 *Kompas* tanggal 16 Agustus 1979, "Pemerataan di Sektor Pendidikan Paling Berhasil"

hanya meneruskan saja sistem yang kita warisi dari jaman kolonial tanpa sempat mengadakan perubahan-perubahan yang mendasar.

Prof. Slamet Iman Santosa, salah seorang tokoh pendidikan yang ditunjuk sebagai Ketua I KPPN berpendapat, bahwa masalah mutu pendidikan kita lebih banyak disebabkan pelaksanaan pendidikan kita sejak kemerdekaan 34 tahun yang lalu berjalan tanpa konsep dasar. Diakui, memang semua sektor dalam lingkungan pendidikan kita ada konsep, tetapi konsep-konsep itu berjalan terpisah dan bila semua digabung menjadi satu konsep pendidikan, ternyata tidak "klop". Jadi tak ada konsep dasar untuk memberi garis lurus pendidikan kita selama 34 tahun ini.¹

Sudah barang tentu bahwa pendidikan kolonial yang dilaksanakan di atas dasar kepentingan politis maupun ekonomis pemerintah kolonial tidak sesuai dengan kepentingan Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang telah merdeka dan harus membangun di segala bidang. Jenis-jenis lembaga pendidikan yang diadakan, struktur persekolahan serta kebijaksanaan pengelolaannya semuanya ditujukan pada kepentingan pemerintah kolonial yang seharusnya sudah kita rombak dan perbaharui sejak tahun-tahun pertama kemerdekaan.

Hal ini kiranya memang sudah disadari seperti di muka telah disinggung, namun usaha dan langkah yang telah dijalankan sejauh ini tampaknya belum sebagaimana diharapkan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 1952 yang merupakan Undang-undang pokok pendidikan dan dimaksudkan untuk mengubah sistem pendidikan kolonial ke arah pendidikan nasional yang berlandaskan dasar falsafah negara Pancasila, di dalam pelaksanaannya ternyata belum cukup mampu menciptakan perubahan, pembaharuan dan pengembangan pendidikan kita. Di samping adanya kekurangan-kekurangan dalam undang-undang itu sendiri serta kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya, situasi sosial, ekonomi dan politik pada umumnya di masa-masa yang lalu kiranya merupakan faktor-faktor yang menghambat dilakukannya usaha-usaha pembaharuan pendidikan secara tepat dan mendasar.

1 *Kompas*, 16 Agustus 1979

Dibandingkan dengan masa sebelum kemerdekaan (masa kolonial) memang terjadi proses perkembangan dalam beberapa segi, antara lain mulai terjadinya proses demokratisasi di bidang pendidikan yang berarti membuka kesempatan yang lebih besar bagi semua golongan masyarakat untuk memasuki sektor-sektor pendidikan yang sebelumnya tertutup bagi golongan-golongan masyarakat tertentu, bertambahnya jumlah lembaga-lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta mulai dari tingkat dasar sampai tingkat pendidikan tinggi. Namun apa yang menjadi permasalahan pokok bidang pendidikan tetap tidak tersentuh, sehingga perkembangan yang tampaknya ada pada hakekatnya lebih bersifat perkembangan secara fisik, itupun tanpa arah yang jelas sehingga pada gilirannya justru menimbulkan permasalahan baru.

Tidak mengherankan apabila pada awal kita memasuki Repelita I (1969) Seminar Identifikasi Problema Pendidikan di Cipayung pada tanggal 28 — 30 April 1969 yang diselenggarakan guna mengidentifikasi problema-problema untuk penyusunan "educational development strategy" menyimpulkan adanya "faktor-faktor krisis" dalam dunia pendidikan di Indonesia, meliputi: ketidakseimbangan antara penambahan jumlah sekolah dengan pertambahan jumlah anak yang membutuhkan pendidikan, ketidakserasian hasil sekolah dengan kebutuhan masyarakat dengan segi-seginya yaitu ketidakseimbangan horisontal dan ketidakseimbangan vertikal serta segi kualitas pendidikan, kekurangan sumber-sumber pembiayaan, masalah peningkatan hasil-hasil pendidikan, tidak adanya efisiensi kerja dan terakhir kekurangjelasan arah pendidikan.¹

Beberapa dari faktor-faktor krisis tersebut sebenarnya juga telah diidentifikasi pada tahun 1966 dan telah diusahakan menanganinya antara lain melalui program-program rehabilitasi dan konsolidasi di samping adanya pemikiran-pemikiran mengenai perbaikan mutu pendidikan, usaha membatasi ter-

¹ Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, *Situasi Pendidikan di Indonesia Selama Sepuluh Tahun Terakhir, Bagian I (Permasalahan)*, CSIS, Jakarta, Maret 1979, hal. 3-6

jadinya putus sekolah (drop-outs), perbaikan dalam segi-segi pengelolaan dan sebagainya. Namun usaha-usaha itu tampaknya belum mencapai hasil yang diharapkan, bahkan beberapa pemikiran tetap tinggal sebagai pemikiran atau rencana yang tidak kunjung terealisasi.

Apabila kita amati, apa yang pada tahun 1969 (awal Repelita I) diidentifikasi sebagai faktor-faktor krisis dalam dunia pendidikan di Indonesia, ternyata belum banyak bergeser pada saat kita memasuki Repelita III. Hal ini dapat dilihat dari masalah-masalah pokok yang dihadapi di bidang pendidikan sebagaimana tercantum di dalam Nota Keuangan Tahun 1978/1979.

Masalah-masalah pokok yang dimaksudkan adalah:

- (1) Pemerataan dan perluasan kesempatan belajar
- (2) Peningkatan mutu pendidikan
- (3) Relevansi pendidikan
- (4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Dari sini kita melihat bahwa masalah-masalah peningkatan mutu pendidikan, relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan merupakan masalah-masalah yang pada tahun 1969 disebut sebagai faktor-faktor krisis dunia pendidikan di Indonesia. Hal ini kiranya dapat diartikan bahwa dalam dua periode Repelita yang telah kita lalui bidang pendidikan belum mendapatkan penanganan secara intensif dan mendasar, sejalan dengan kebijaksanaan dalam meletakkan titik berat usaha pembangunan dalam Repelita I dan II.

Baru dalam Repelita III sekarang di mana masalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan ditempatkan sebagai salah satu jalur pemerataan pembangunan dan hasilnya diharapkan penanganan permasalahan di bidang pendidikan akan lebih ditingkatkan sehingga gagasan dan cita-cita untuk memiliki suatu sistem pendidikan nasional terwujud demi kemajuan dan perkembangan bangsa.

ANALISA

Sebagaimana telah disinggung di muka, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan merupakan masalah yang sangat penting dan mendesak dan-menjadi hajat sebagian besar rakyat Indonesia dewasa ini. Namun dari segi pembangunan pendidikan sebagai satu keseluruhan, masalah pemerataan pendidikan hanyalah merupakan salah satu dari permasalahan pokok dunia pendidikan kita. Dari segi ini maka pemerataan pendidikan haruslah dikaitkan langsung dengan peningkatan mutu pendidikan, relevansi hasil-hasil pendidikan dengan kebutuhan bangsa dan masyarakat serta peningkatan di bidang pengelolaan pendidikan. Dengan perkataan lain, sebagaimana di muka telah dikemukakan, usaha pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu ditangani dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan nasional.

Memperhatikan faktor-faktor krisis ataupun masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan kita sebagaimana di muka telah disebut, kita menyadari bahwa sejauh ini ternyata belum banyak yang sudah dicapai dalam usaha pembangunan pendidikan. Pada masa-masa yang lalu kesempatan untuk membenahi bidang pendidikan memang sangat terbatas, baik karena faktor-faktor sosio ekonomis maupun faktor-faktor sosio politik, sementara perkembangan terus terjadi sehingga permasalahannya menjadi semakin kompleks.

Ledakan pertumbuhan penduduk dalam periode setelah Perang Dunia Kedua jelas merupakan tekanan yang berat pada semua bidang kehidupan, tidak terkecuali bidang pendidikan. Masalah pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan timbul untuk sebagian besar disebabkan karena persoalan itu. Mutu pendidikan makin merosot sebagai konsekuensi logis dari ketimpangan-ketimpangan yang terjadi akibat dari perkembangan yang tidak dapat terencana baik, pengelolaan yang asal jadi dan tanpa kontrol. Dan semua itu berjalan atau terjadi di dalam suatu kerangka sistem yang memang sejak saat pertama dibangun oleh pemerintah kolonial dulu memang ditujukan untuk kepentingan kelangsungan hidup pemerintah kolonial. Dari

sini timbul masalah relevansi pendidikan, dalam arti bahwa hasil-hasil pendidikan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Keadaan demikian menjadi semakin terasa pada saat kita mulai melaksanakan usaha dan kegiatan pembangunan nasional secara terencana dan sistematis.

Di samping semuanya itu segi-segi pengelolaan merupakan kelemahan yang umum di hampir semua bidang sehingga dana yang serba masih terbatas itu kurang dapat dimanfaatkan secara optimal. Khususnya di sektor pendidikan kelemahan dalam bidang pengelolaan ini menjadi semakin terasa karena di dalam perkembangannya kita melihat terjadinya semacam "penyimpangan" dalam bentuk terlalu banyaknya instansi dan kelembagaan yang menangani, meskipun "penyimpangan" tersebut mungkin pada permulaannya lebih bersifat sebagai tindakan darurat untuk mengatasi keadaan atau kebutuhan yang mendesak. Tetapi sejak beberapa tahun terakhir kalangan pendidikan banyak yang mulai mempertanyakan masalah ini, khususnya dalam rangka memikirkan kembali masalah pembangunan pendidikan, yang salah satu aspeknya adalah permasalahan di sekitar organisasi, administrasi dan pengelolaan pada umumnya.

Dari semuanya itu kita melihat bahwa jawaban yang paling tepat adalah dengan memperbaharui seluruh sistem pendidikan nasional kita secara semesta, menyeluruh dan terpadu sebagaimana pada waktu ini ditugaskan kepada Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional yang dibentuk sejak bulan Agustus 1978 yang lalu. Melalui KPPN tersebut diharapkan bahwa kita akan memiliki satu konsep tentang sistem pendidikan nasional, di atas konsep mana pendidikan itu dilaksanakan dan dikembangkan selanjutnya.

Sejauh yang dapat kita ikuti perkembangannya, baik dari segi personalianya, cara kerja dan cara pendekatan permasalahannya, kiranya cukup beralasan apabila kita menaruh harapan yang besar akan berhasilnya Komisi dalam menunaikan tugas yang dipercayakannya. Di dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari tahap inventarisasi sampai pada tahap penyusunan

tahap finalisasi Komisi selalu mengundang partisipasi masyarakat, sehingga konsep yang nanti akan dihasilkan merupakan hasil perpaduan pemikiran dari banyak pihak, dari seluruh masyarakat. Cara kerja yang demikian adalah sangat tepat karena kita semua menyadari bahwa pendidikan nasional bukan hanya menjadi masalah pemerintah tetapi ia adalah masalah seluruh bangsa. Melalui GBHN kita juga sudah sepakat bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Pendekatan permasalahan dalam rangka penyusunan konsep pembaharuan pendidikan nasional sebagaimana dapat diikuti dalam Pokok-pokok Pikiran Pembaharuan Pendidikan Nasional¹ yang telah disebarluaskan ke seluruh penjuru tanah air, kiranya sudah merangkum permasalahan-permasalahan pokok yang ada di dunia pendidikan kita sampai pada saat ini, meskipun di sana-sini mungkin masih memerlukan penyempurnaan. Hal ini juga telah disadari oleh Komisi seperti dinyatakan dalam kata pengantar buku tersebut oleh Ketua I KPPN.

Adalah menjadi harapan kita semua bahwa melalui jalur pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan sebagai salah satu jalur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta dilanjutkan dengan langkah pembaharuan sistem pendidikan nasional yang prosesnya sedang berjalan ini, bangsa Indonesia semakin mendekati tujuan perjuangannya selama ini yaitu terwujudnya masyarakat yang berkeadilan sosial dalam kesatuan dengan asas-asas dasar sebagaimana dirumuskan dalam Pancasila.

1 Lihat *Pokok-pokok Pikiran Pembaharuan Pendidikan Nasional*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional, Jakarta, 1979

